



# Pembangunan DKI Dipastikan Terhambat

**JAKARTA** — Proyek pembangunan di DKI Jakarta dipastikan terhambat akibat kisruh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2015. “Semua program terpaksa mundur,” kata Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah di Balai Kota, kemarin. Proyek yang terhambat antara lain pembangunan sekolah dan perbaikan jalan.

Sebanyak 55 sekolah di seluruh Jakarta pada tahun ini sudah dianggarkan untuk direhabilitasi total. Itu terdiri atas 33 sekolah dasar, 17 sekolah menengah pertama, 1 sekolah menengah atas, dan 3 sekolah menengah kejuruan, serta satu kantor pusat pendidikan kejuruan di Jakarta Timur. Anggaran yang disiapkan sebesar Rp 543,41 miliar.

Salah satu yang pembangunannya mangkrak adalah SMA Negeri 55 Jakarta Selatan. Bangunan sekolah masih berupa tiang-tiang beton. Karena bangunan itu belum bisa dipakai, siswanya harus berpencar menumpang di sekolah lain. Jika anggaran telat, pembangunan sekolah ini dipastikan juga akan molor.

Saefullah mengatakan, untuk mengakalinya, satuan kerja perangkat daerah telah melakukan tender sejak Januari lalu. Jadi, saat anggaran disahkan, dan bisa dicairkan, proyek bisa dikebut. Menurut Saefullah, sebenarnya masih ada opsi penggunaan APBD 2014 Perubahan jika pembahasan dengan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berakhir buntu.

Pemerintah DKI dijadwalkan membahas kembali APBD 2015 setelah evaluasi anggaran dari Kementerian Dalam Negeri rampung. Namun, Saefullah berujar, pemerintah DKI berupaya agar tetap bisa menggunakan anggaran yang disusun pada tahun ini.

Alasannya, kata Saefullah, penggunaan APBD 2014 Perubahan menghasilkan beberapa konsekuensi. Salah satunya, batalnya pemberian tunjangan kinerja daerah yang bersifat dinamis berdasarkan kinerja bagi pegawai negeri. “Kami harus

dahulukan program lain.”

Kepala Badan Pengelola Keuangan DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan pihaknya tengah menyusun dasar hukum penundaan pemberlakuan tunjangan yang bersifat dinamis. “Kami juga akan minta pendapat dari para ahli hukum,” tuturnya.

Sekretaris Jenderal Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran, Yenny Sucipto, mengatakan proyek DKI Jakarta bisa terhambat jika memakai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2014. Salah satu program yang terhambat misalnya Kartu Jakarta Sehat dan Kartu Jakarta Pintar. “Alokasi tahunannya pasti tak sama,” ucapnya, kemarin.

Karena itu, Yenny meminta politikus di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jakarta menerima keputusan Menteri Dalam Negeri yang lebih memilih APBD versi pemerintah ketimbang DPRD. Jika ingin mengubah, DPRD bisa melakukannya dalam kurun 4-5 bulan ke depan. “Bisa dilakukan di APBD Perubahan,” kata dia. ● LINDA HAIRANI | NUR ALFIYAH